

**PERGULATAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA
(Studi Kritis Hasil Ijtmia' Ulama IV GNPF-U tentang NKRI Bersyariah)"**

**DISUSUN OLEH:
KETUA:**

Nama	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP	196003071992021001
NIDN	2007036002
Jabfung	Profesor/Guru Besar
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

ANGGOTA

Nama	Fauzan, MH
NIP	1977072520021003
NIDN	202507702
Jabfung	Lektor/IIId
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nama	Wira Hadikusuma, M.SI
NIP	198601012011011012
NIDN	20018601
Jabfung	Lektor/IIId
Prodi	Manajemen Dakwah

**DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2021**

**LPPM IAIN BENGKULU
TAHUN 2020**

**PERNYATAAN BERSAMA
(KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENGUSUL
PROPOSAL PENELITIAN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP	196003071992021001
NIDN	2007036002
Jabfung	Profesor
Prodi	Hukum Tata Negara

ANGGOTA

Nama	Fauzan, MH
NIP	1977072520021003
NIDN	202507702
Jabfung	Lektor/III d
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nama	Wira Hadikusuma, M.SI
NIP	198601012011011012
NIDN	20018601
Jabfung	Lektor/III c
Prodi	Manajemen Dakwah

Adalah benar, secara bersama-sama dan partisipasi sebagai pengusul proposal penelitian yang berjudul "Pergulatan Hukum di Indonesia dan Implementasinya (Studi Kritis Hasil Ijtima' Ulama IV GNPF-U tentang NKRI Bersyariah)", serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Demikian pernyataan bersama ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya sesuai aturan.

Ketua Kelompok



Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

Dibuat di Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2019

Anggota



Fauzan, MH

Anggota



Wira Hadikusuma, M.SI

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pernyataan Bersama	ii
Daftar Isi	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)	5
E. Konsep dan Teori Relevan.....	5
F. Metode dan Teknik Pengambilan Data.....	15
G. Rencana Pembahasan.....	17
H. Pustaka Acuan dan Bibliografi	18

SEJARAH PERGULATAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA (Studi Kritis NKRI Bersyariah dan Negara Beragama *benchmarking* Negara Madinah)

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan menganalisis sejarah pergulatan hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya. Senin, 5 Agustus 2019, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), melakukan keputusan menyengangkan. Melalui Ijtima" Ulama IV, GNPF-U menghasilkan delapan keputusan. Kesemuanya, terlihat menarik, dan yang paling menarik adalah rekomendasi paham NKRI Bersyariah. Melalui, penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan pendalaman kaidah, pada perspektif sejarah pergulatan hukum Islam di Indonesia dan implementasinya.

Penelitian ini menarik karena berupaya memberikan *counter attack* pada simpatisan atau masyarakat yang saat ini terpapar kaidah keislaman radikal. Seperti halnya, NKRI Bersyariah, konsep yang diwacanakan akan menimbulkan gerakan, bahkan gejolak politik kenegaraan. Belum genap sepekan dari hasil *ijtima' ulama IV* yang diprakarsai oleh GNPF-U, telah menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai pihak. Gus Sholah (KH Sholahuddin Wahid, Wakil Presiden Ke-6 Tri Sustrisno, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Riyakudu serentak menolak wacana NKRI Bersyariah. Pihak ini menyebut, bahwa Pancasila adalah final untuk pondasi berbangsa. Terlebih, tercantum pada sila pertama, bahwa negara berketuhanan yang maha esa, dan mengandung muatan nilai moderasi bagi pengamalnya.

Pancasila pun Konstitusi UUD 1945, sebenarnya merupakan alat yang paling moderat dan berdiri seimbang di atas semua golongan. Moderasi beragama dalam bernegara selama ini telah terakomodir dengan adanya empat pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah manifestasi tak terbantahkan dan sebagai azas identitas asli Indonesia. Konsep ini tidak jauh beda dengan bagaimana Rasulullah Saw mendirikan pemerintahan di negeri Madinah. Piagam Madinah sebagai konstitusi ternyata telah mampu mengakomodasi semua kepentingan dan golongan. Karenanya, sebenarnya kita dapat menguatkan adanya asumsi, bahwa empat pilar berbangsa dan bernegara sesuai dengan pandangan islam secara filosofis. Artinya, hal ini menjadi *benchmarking* negara Madinah di Indonesia.

Istilah negara Islam semasa Rasulullah Saw, tidak pernah dimunculkan. Hanya, istilah Piagam Madinah yang menjadi konstitusi dasar sebuah negara. Lantas, sewajarnya, jika tokoh muslim dan cendikia bersikeras untuk melawan paham NKRI Bersyariah, atau semisalnya. Sebuah wacana ini, jika terus diliarkan, akan menjadi gerakan sparatis. Dahulu, NI/DII yang dipimpin Kartosuwiryo pernah mencetuskan gerakan serupa.

Norma hukum Islam sebagai ajaran universal mengajarkan bahwa “cinta tanah air adalah sebagai bagaian dari iman”. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun *ukhuwah wathaniyah* (Persaudaraan sesama warga negara/ sebangsa dan setanah air). Dalam norma hukum Islam, diajarkan adanya kebersamaan dan integrasi kebangsaan/ideologis agar ada ikatan emosional dan ideologis sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini telah digariskan oleh Nabi Muhammad Saw dengan perjanjian dengan non-Muslim ketika membangun negara Madinah:

“Setelah menancapkan pilar-pilar masyarakat baru yang Islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik dan peraturan di antara kaum muslim, beliau (nabi Saw) mulai mengatur hubungannya dengan non Muslim. Tujuan beliau dibali itu adalah memberi rasa aman, damai, kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, disertai dengan pengaturan kawasan tersebut dala satu kesepakatan. Untuk itu, beliau menyusun peraturan-peraturan berkaitan dengan toleransi dan saling pengertian yang belum pernah dikenal oleh dunia yang dipenuhi oleh fanatisme, ambisi-ambisi pribadi dan etnis..... berikut poin-poin penting yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut: 1. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Au adalah satu kesatuan bersama kaum Muslim; 2. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurus nafkah sendiri. 3. Sesungguhnya diantara mereka terikat perjanjian untuk melawan yang memerangi penandatanganan lembaran perjanjian ini 4. Sesungguhnya diantara mereka terikat perjanjian untuk menasehati dan berbuat baik, bukan melakukan perbuatan dosa. 5. Sesungguhnya seseorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya. 6. Sesungguhnya mereka berjanji menolong orang yang didzalimi. 7. Sesungguhnya orang Yahudi bersepakat dengan kaum Mukminin selama mereka diperangi. 8. Sesungguhnya daerah sekitar kota Yasrib menjadi tanah Haram karena adanya lembaran perjanjian ini11. Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian saling membantu melawan pihak yang menyerang Yasrib (madinah); masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan ke arah mereka.¹

Norma hukum di atas, menggariskan bahwa sistem hukum harus mencerminkan aspirasi dan ideologi warganya serta harus memiliki rasa cinta untuk membela tanah air dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, suku, agama dan lainnya. Semua warga negara berkewajiban menjaga keutuhan negara dari musuh-musuh yang menyerangnya.

¹Syeikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *ar-Rahiq al-Makhtum*, terj. Hanif Yahya Dkk, (Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001), hlm 277-278

Kedua, “sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan asas-asas demokratis dan nomokratis”. Dalam norma hukum Islam diajarkan adanya prinsip musyawarah dan adanya kaidah bahwa setiap tindakan harus berlandaskan norma hukum. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad Saw mengajarkan pada umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh asas musyawarah mufakat. Tidak boleh muslim sebagai warga negara menafikkan pihak lainnya, tetapi justru harus membangun kebersamaan untuk melakukan musyawarah dalam menentukan arah dan jalannya kehidupan kenegaraan yang dikehendaki bersama. Semua kesepakatan itu harus dilandasi aturan hukum yang berlaku sesuai ajaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Semua kepentingan pribadi dan dendam pribadi atau kelompok harus dikikis habis dan diganti dengan rasa toleransi dan persaudaraan hakiki yang mencerminkan rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap kaum duafa.” Ketiga, “sistem hukum nasional harus mampu mewujudkan keadilan sosial”. Norma hukum Islam mengajarkan keadilan bagi warganya. Keadilan itu menjadi ajaran universal yang dapat digunakan dan diterapkan dalam kondisi apa pun, sehingga tidak ada halangan untuk menerapkan norma hukum Islam di mana pun dan kapan pun. Norma hukum Islam mengajarkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam membangun tata hukum. Dengan adanya penegakkan keadilan, maka kemaslahatan hidup manusia dapat diwujudkan dan ditegakkan sesuai koridor hukum. Dalam bahasa Jimly Asshiddiqie, keadilan sosial akan terwujud jika diikuti dengan regulasi hukum yang jelas. Oleh sebab itu, kemajemukan kepentingan dan aspirasi warga harus dipayungi dengan regulasi hukum yang sah dan konstitusional melalui proses kompromi-kompromi.

Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara. Kontrak sosial tersebutlah yang mengikat seluruh bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama merefleksikan kebhinnekaan yang dipersatukan dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Jika kebhinnekaan tersebut tidak dijamin dan tidak diakui keberadaannya, tentu tidak tercapai kesepakatan bersama dan tidak dapat hidup sebagai satu bangsa dan satu negara. Konsensus yang diwujudkan dalam konstitusi dapat dipahami substansinya sebagai substansi paham konstitusionalisme yang meliputi tiga hal, yaitu: 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). 2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). 3. Kesepakatan tentang

bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).²

Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 adalah hasil identitas dari pengejawantahan kompromi-kompromi demokratis dari berbagai pihak dan golongan. Artinya, prinsip terbentuknya hingga pengimplementasiannya sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah Saw telah terapkan saat menjadi pemimpin umat di Madinah kala itu. Lantas, sebenarnya tidak ada salah dari diksi UUD 45, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, karena sudah mendekati kemiripan dengan Konstitusi Madinah saat itu. Artinya, Ijtima" Ulama IV GNPF-U, barangkali hanya mengungkapkan sensasi dan eksistensi mereka, bahwa mereka ada. Karena, tidak berbicara pada tataran substansi dan aplikasi sebagaimana telah terjadi 74 tahun silam. Asumsi dapat saja muncul, bahwa mereka hanya ingin menunjukkan bahwa gerakannya ada, meskipun perjuangan politiknya kandas di pemilu 2019. Setidaknya, tendensitas ini terlihat pula pada klausul hasil musyawarah GNPF-U, bahwa menolak pemimpin hasil pemilu 2019, dan menganggap pemilu 2019 curang secara terstruktur, masif, dan sistematis, bahkan brutal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana NKRI Bersyariah oleh GNPF-U ditinjau dari Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya (Studi Kritis NKRI Bersyariah dan Negara Beragama *benchmarking* Negara Madinah)? Selanjutnya dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan politik hukum Islam terhadap hasil ijtima" ulama IV GNPF-U tentang NKRI Bersyariah?
2. Bagaimana Implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Relevansi terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tinjauan politik hukum Islam terhadap hasil ijtima" ulama IV GNPF-U tentang NKRI Bersyariah.
2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

² Jimly Asshiddiqie, "Kormitusi dan Kebhinnekaan", Bahan disampaikan pada acara Seminar "Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi". 'selenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Sirajuddin M dalam penelitiannya, berjudul, “Sejarah Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia” mengungkap berbagai hal menarik. Tidak hanya tentang aspek sejarah politik hukum Islam, tetapi juga menunjukkan beberapa bukti elaborasi konsep dan aplikasi atau produk peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut menyebut adanya relasi hukum Islam dan politik hukum terintegrasi pada norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Penelitian tersebut juga mengungkap, bahwa secara substansi norma hukum Islam telah mengakselerasi penerapan dan pengembangan hukum nasional sejak adanya pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari produk turunannya, antara lain: UU tentang Perkawinan, UU tentang Zakat, Haji dan Perbankan Syariah. Dengan demikian, regulasi norma hukum Islam merupakan hal yang konstitusional dalam pelebagaan hukum nasional.

M. Masykuri Hadi mengungkapkan pula adanya penetrasi nilai-nilai hukum Islam dalam konstitusi negara ini. Melalui karya ilmiah berjudul, “Konsep Negara Hukum dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, berupaya untuk menguatkan gagasan substansial Islam pada tataran aplikasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu, apa yang dikenal dengan istilah „Nomokrasi Islam“, setidaknya telah diterapkan pada konsep demokrasi dengan azas musyawarah mufakat. Lembaga legislatif selama ini menggunakan prinsip tersebut, memberikan ruang bagi semua fraksi dan golongan guna mengungkapkan aspirasi. Prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit sesuai dengan konstitusi UUD 45. Sementara itu, musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan juga bagian dari upaya pengejawantahan nilai-nilai dasar pancasila, sebagaimana termaktub pada butir sila ke tiga Pancasila.

E. Konsep dan Teori Relevan

1. Upaya Melindungi Segenap Bangsa

Sistem hukum nasional harus mampu mewujudkan toleransi hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa”. Sistem hukum nasional harus mampu memberikan ruang dan payung hukum dalam tata kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad Saw mengajarkan pada warga masyarakat dan negara untuk hidup toleran dan negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa memperhatikan latar belakang agamanya. Negara memberikan kebebasan kepada

warganya untuk mencari mata pencaharian tanpa ada diskriminasi negara, melindungi semua warga dari segala bentuk perlawanan dan permusuhan dari luar negara, negara berkewajiban mengarahkan warganya untuk berbuat baik dan menjalankan aturan hukum yang berlaku, negara memberikan kebebasan untuk berorganisasi dengan syarat tidak melawan pemerintahan yang sah, negara berkewajiban melindungi dan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, negara berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian dan kerukunan, seluruh warga negara berkewajiban menjaga kehormatan tanah airnya yang dikenal dengan “kota Yasrib menjadi Tanah Haram”, dan seluruh warga negara berkewajiban menjaga keutuhan ideologis dan teritorial negara.³

Seperti halnya terpaparkan pada batang tubuh pembukaan UUD 1945. Jelas, bahwa terbentuknya pemerintahan adalah bagian dari upaya melindungi segenap bangsa. Belum lagi, di dalamnya juga jelas menunjukkan bahwa identitas Indonesia direpresentasikan dengan berbagai penguatan Pancasila. Semangat substansi tersebut, tidak bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana saat ia memimpin Madinah kala itu. Sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD 45, alenia 4, tersebut bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. Relasi Hukum Islam dan Politik Hukum di Indonesia

Sejarah pelebagaan hukum Islam perlu dikaji dengan mendalam karena norma hukum Islam telah memberikan sumbangan konkrit dalam sejarah pelebagaan hukum nasional. Hukum Islam telah menjadi bagian esensial dari sejarah hidup bangsa Indonesia, sehingga pelebagaan hukum Islam juga bagian dari sejarah budaya hukum dan politik hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam telah tumbuh dan berkembang secara integral dengan lahirnya negara Indonesia, bahkan sejak sebelum Belanda dan Jepang

³ al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq al-Makhtum... hlm. 277-278

menjajah wilayah Indonesia, dahulunya Nusantara. Oleh sebab itu, dinamika hukum Islam menarik untuk dikaji karena dalam kondisi apa pun tetap eksis, lebih sejak masa Kemerdekaan RI hingga masa kini, norma hukum Islam telah memberikan sumbangan yang lebih besar dalam pelebagaan hukum nasional.⁴

Eksistensi hukum Islam sebagai ajaran agama yang sesuai dengan titrah manusia memiliki tingkat daya tahan yang lebih kuat dan kokoh karena setiap norma dan ajarannya tidak menyimpang dari sifat hakiki manusia, tetapi justru memberikan dukungan terhadap dinamika perkembangan hidup umat manusia baik secara historis, kultural maupun politik. Norma hukum Islam memberikan ruang untuk melakukan perbaikan dan pembangunan hidup umat manusia dalam sistem kenegaraan apa pun yang terpenting memberikan kemaslahatan baik lahir maupun batin.

a. Hukum Islam Masa Kerajaan Islam

Sejarah perjalanan hukum Islam pada dasarnya merupakan sejarah eksistensi umat manusia yang berdampingan dan berkelindan dengan budayanya. Demikian juga berlaku di Indonesia. Sebagaimana diteliti oleh ilmuwan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra, yang menyebutkan bahwa sejarah perjalanan Islam termasuk perkembangan hukumnya, disebutkan dengan beberapa teori, yakni *Pertama*, Drewes menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara melalui jalur anak Benua India. Ajaran Islam tersebut dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Arab yang berafiliasi dengan madzhab Imam Syafii yang bemukim di Gujarat dan Malabar yang kemudian dibawa ke Nusantara melalui jalur Sumatera, tepatnya di wilayah kekuasaan Kerajaan Pasai. Di wilayah itu juga berkembang kuat madzhab Syafii, bahkan hingga masa kini. Walaupun demikian, teori ini masih dipertentangkan, karena secara historis, Islam telah berkembang dengan baik pada waktu Gujarat masih dikuasai Kerajaan Hindu. Teori ini kontra produktif dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Islam berkembang dari wilayah Gujarat yang menjadi tempat singgahnya orang-orang Muslim, da'i penyebar ajaran Islam. Walaupun teori tersebut memiliki kelemahan, Snouk Hurgronje tetap menjadi bagian dari pengikut teori Drewes, yang berpendapat bahwa Islam berkembang dari anak Benua India. Dengan demikian, dari analisis kesamaan madzhab hukum di dua daerah tersebut

⁴ „Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”. <http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/06/20/19573/> menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/, diakses 16 Desember 2012

bisa diakui kebenarannya, tetapi dari analisis fase sejarah memiliki kelemahan. *Kedua*, ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui teluk Belanga. Alasan yang dikemukakan, batu nisan makam Fatima binti Maimun yang menyebarkan Islam di Laren Jawa Timur yang bertahun 1082 M/ 475 H memiliki kemiripan dengan batu nisan di Bengala. Teori ini menilai bahwa masuknya Islam ke Nusantara dengan dasar analisis situs-situs sejarah kaum Muslim yang ada di dua daerah tersebut. Namun demikian, jika dianalisis dari sisi muatan ajaran hukum Islam yang dianut oleh dua daerah tersebut, maka terdapat kelemahan teori tersebut. Sebab, kaum Muslim Nusantara mayoritas bermadzhab Syafli, sedangkan kaum Muslim Bengala mayoritas bermadzhab Hanafi. *Ketiga*, ilmuwan peneliti yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur Colomader dan Malabar. Analisis sejarah ini menilai bahwa ada kesamaan aliran madzhab hukum, yakni di dua wilayah tersebut memiliki kesamaan madzhab, yakni madzhab Syafii yang dianut dan diamalkan. Adapun jalur Gujarat tidak mungkin terjadi waktu itu karena jalur perdagangan belum berkembang di Gujarat, bahkan jalur perdagangan waktu itu belum sampai ke Nusantara, sedangkan para penyebar ajaran Islam di Nusantara berasal dari para da'i yang berprofesi sebagai pedagang Muslim. Keempat, ilmuwan peneliti yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara (terutama daerah Aceh dan Sumatera) melalui jalur orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga otentisitas ajaran Islam bersifat niscaya karena ada hubungan langsung antara sumber datangnya Islam dengan daerah penyebaran Islam, tidak melalui jalur perantara. Oleh sebab itu, jalur penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang Arab kemudian dikenal dengan "penyebaran Islam melalui sumber aslinya". Naqiub al-Attas merupakan salah satu tokoh pendukung teori penyebaran Islam yang terakhir tersebut.⁵

Dinamika norma hukum Islam menjadi bagian esensial dari sejarah hidup masyarakat Muslim Nusantara, bahkan norma hukum Islam telah menjadi falsafah hidup bermasyarakat dan berpolitik, misalnya di Aceh, Sulawesi Selatan, Miangkabau, Riau dan Padang, sehingga di wilayah tersebut ada pepatah yang

⁵ M Tautik Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni dan Hadisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hal. 111-113; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).

menyatakan bahwa “adat bersendi syara“, syara“ bersendi kitabullah”.⁶ Relasi norma hukum Islam dan budaya masyarakat telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hukum Islam telah menjadi falsafah hidupnya. Dalam sejarahnya, perkembangan hukum Islam cukup pesat pada waktu itu, yakni masa-masa abad XVII, XVIII, dan XIX. Pada waktu itu, masyarakat telah menjalankan ajaran hukum Islam dengan intensif dan masih baik dalam bidang perdagangan, perkwinan, peradilan, dan terutama ibadah ritualnya. Hukum Islam yang hidup di masyarakat diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku mandiri di wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Nusantara yang kemudian muncul sejumlah lembaga pengadilan Islam, misalnya pemberlakuan hukum Islam dijalankan melalui Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar‘iyyah di Sumatera, dan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan tersebut tidak hanya mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata, tetapi juga mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pidana.⁷

Dalam sejarahnya, bahkan ada sejumlah karya kitab karya ulama Nusantara yang dijadikan rujukan dalam pelebagaan hukum kenegaraan sebagaimana dikutip Harun menyebutkan bahwa kitab *Sirat al-Mustaqim* ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XVII) telah menjadi buku hukum Islam pertama yang disebarkan di seluruh Nusantara, Kitab *Sabil al-Muhtadin Li Ifaqah ji Amr al-Din* ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) yang menjadi kitab hukum yang berkarater Syaii‘iyyah, yang dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Kesultanan Banjar, *Kitab al-Mu’in al Mubin, Mabadi’ Awwaliyyah, as- Salam* dan *al-bayan* karya Hamid Hakim (abad XIX) adalah kitab fiqh dan ushul fiqh, tidak saja dipelajari di pesantren Minangkabau, tetapi juga dipelajari di Malaysia dan Thailan Selatan.⁸

Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa norma hukum Islam pada dasarnya menjadi bagian esensial dari budaya dan politik hukum dalam wilayah Kekuasaan Islam Nusantara, bahkan sistem hukum yang diterapkan secara mandiri dan diakui eksistensinya sebagai bagian dari esensi hukum karena bersumber dan berasal dari

⁶ 23 Harun, “Pakembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia”, Jurnal Suhuf, Vol. 21, No. 2, November 2009, hal. 157; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).

⁷ Harun, “Perkembangan Hukum Islam”, hal. 158.

⁸ Haruan, “Perkembangan Hukum Islam”, hal. 158.

budaya masyarakat. Inilah pentingnya kajian hermeneutika Betti dimana kajian historis itu akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian keilmuan di masa kini dan apa yang aktual di masa lalu tidak mesti saat ini harus dinafikan, karena bisa jadi, apa yang aktual bisa juga masih aktual di masa kini. Oleh sebab itu, kajian historis hukum Islam memberikan manfaat untuk menegaskan eksistensi pentingnya norma hukum Islam yang berkembang di masa-masa kerajaan Islam untuk dikembangkan di masa berikutnya.

b. Hukum Islam Masa Kemerdekaan RI hingga Masa Kini

Pelebagaan norma hukum Islam tidak hanya sampai pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga perlu melakukan upaya pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem kenegaraan, bukan hanya sekedar substansinya saja. Upaya-upaya menjadikan norma hukum Islam menjadi bagian dari asas bernegara dan sistem hukum positif telah berkembang sejak awal-awal pendirian Negara Indonesia. Hal ini lahir setidaknya bersamaan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dibuktikan dengan adanya sila pertama Pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun demikian, upaya menjadikan norma hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional secara eksplisit dalam sistem hukum tata negara Indonesia menjadi suram pada 18 Agustus 1945, dimana tim sukses dari golongan Muslim tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir karena adanya tuntutan dari sebagian warga minoritas yang tidak menghendaki tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, ada sebagian yang berpendapat bahwa hal itu menjadi awal dari sulitnya untuk melakukan pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional.⁹ Berbeda dengan pendapat tersebut, Mohammad Hatta justru berpendapat bahwa Pancasila terutama Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi pedoman dalam membangun idealisme bernegara dan menjadi dasar dari sila-sila berikutnya. Hilangnya tujuh kata itu tidak berarti bahwa kaum Muslim Indonesia hilang kesempatan untuk memberlakukan norma hukum Islam yang ada di masyarakat, tetapi tetap memiliki kesempatan dalam memberlakukan norma hukum Islam. Pancasila tetap menjadi prinsip spiritual dan etik dalam membangun

⁹ Harun, “Perkembangan Hukum Islam....”, hlm. 163; Anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126-130.

idealisme hidup rakyat dan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim tanpa menafikan komunitas non-Muslim. Dengan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, Negara memperoleh landasan yang kokoh sebagai negara yang religius tetapi bukan negara agama.¹⁰

Pada masa Orde Lama, kedudukan norma hukum Islam tidak lebih baik dari masa penjajahan Belanda yang diskriminatif dan otoriter. Pandangan Soekarno terhadap agama sangat sekularistik walaupun pada awal pembentukan Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta, tetapi Soekarno kemudian bersikap realistis terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama Budhda, Hindu, Kristen dan Katholik, sehingga ia kemudian mengambil jalan tengahnya. Dengan menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai agama tetap bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam arti tidak memperhatikan agama sama sekali.¹¹ Meskipun demikian, tidak adil jika tidak menyebut bentuk prestrasi Presiden Soekarno yang telah menjadikan agama pada eranya sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia yang esensial dan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Setidaknya berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 telah menjadi tonggak sejarah awal dari perjalanan hukum agama (Islam).¹² Dengan terbentuknya Departemen Agama, maka umat Islam dapat berperan aktif dalam pelebagaan hukum nasional dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bahkan pada awalnya dengan adanya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada Menteri Agama.²⁹ Walaupun di masa kini dikembalikan kepada Mahkamah Agung.

Pada masa-masa awal Pemerintahan Orde Baru yang dimulai dengan sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), rezim Soeharto masih menyimpan trauma dengan formalisasi agama dalam sistem kenegaraan. Masa-masa awal rezim Soeharto diharapkan banyak kalangan Muslim, ada suasana baru dari sebelumnya yang sempat terjadi ketegangan antara kaum agamawan dengan

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Pematuration dalam Komtituante*, (Jakarta: LPSEs, 1985), hlm. 155-156.

¹¹ Maarif; *Islam dan Masalah Kenegaraan.....*, hlm. 132.

¹² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja W, 2000). hlm. 83-84; .Harun, "*Perkembangan Hukum Islam*", hlm. 164.

nasionalis, tetapi Soeharto ternyata lebih percaya pada kaum nasionalis dalam arti tertentu mengambil jarak. Walaupun demikian, rezim pemerintahan Soeharto sejak separuh terakhir, mulai melakukan sikap akomodasi terhadap aspirasi umat beragama, terutama umat Islam. Keberadaan UU Perkawinan tahun 1974 merupakan bukti sejarah bahwa hukum Islam memasuki fase baru, yaitu fase *taqin* (pengundangan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga peradilan yang khusus bagi umat Islam yang mempunyai nilai strategis karena keberadaannya memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap, yaitu Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹³ Undang-Undang Pendidikan Nasional, kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit membolehkan berdirinya Bank-Bank Syariah. Kondisi ini merupakan bukti, perkembangan norma hukum Islam secara kelembagaan dan produk-produk ijtihad hukumnya semakin berkembang sebagai asas dalam pembentukan hukum nasional.¹⁴

Dalam perkembangannya, Orde Reformasi telah memberikan keterbukaan untuk mengakomodir norma-norma hukum Islam setelah Indonesia menapaki era baru, yaitu peralihan kekuasaan politik dari pemerintah Orde Baru kepada pemerintahan era reformasi yang berlaku hingga masa kini. Dalam era reformasi, ada banyak ruang keterbukaan dan usulan dari sejumlah elemen masyarakat sehingga norma budaya dan norma agama, termasuk norma hukum Islam menjadi salah satu sumber materiil pelembagaan hukum nasional.¹⁵ Sejumlah perundang-undangan yang bersumber dari sumber materiil norma agama Islam misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu dalam sistem regulasi *mu'amalah* juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor

¹³Harun, "Perkembangan Hukum Islam", hlm. 165; Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008)

¹⁴ Harun, "Perkembangan Hukum Islam", hlm. 165

¹⁵ Harun, "Perkembangan Hukum Islam", Mm. 166. 32 M Masykuri Hadi, "Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No 1* Volume 8 Juni 2008, hlm. 104, lihat: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf>

10 tahun 1990 tentang Perubahan atas UU 1992 tentang Perbankan.¹⁶ Sumber materiil norma agama Islam tersebut menjadi indikator bahwa norma hukum Islam di Indonesia dapat diterapkan dalam sistem kenegaraan setelah melalui proses legislasi, sehingga ketika norma hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, maka norma hukum Islam itu menjadi norma hukum nasional, yakni hukum positif di Indonesia.

Demikian juga Era Otonomi Daerah menjadi awal mula munculnya perda-perda yang bemuansa syariat Islam yang tentu saja bersumber dari norma hukum Islam. Menurut Mahfud MD, penyerapan norma hukum Islam menjadi hukum positif tidaklah salah karena hal itu merupakan bagian dari usaha mengisi ruang keterbukaan yang disediakan oleh sistem hukum nasional. Dengan demikian, secara legal formal dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak bisa disebutkan sebagai hukum agama, tetapi secara legal substansial, hukum nasional itu bersifat religius karena telah menyerap nilai-nilai substantif agama meliputi keadilan, amanah, kejujuran, demokrasi, dan sebagainya. Dalam artian, norma hukum Islam menjadi sumber hukum nasional dalam segmentasi bahan pembuatan hukumnya, bukan dalam arti hukum formal nasional.¹⁷

Dalam upaya mengakomodir norma hukum agama, ada sejumlah norma hukum/agama yang diserap dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di Indonesia yang tidak hanya mengendepankan aspek legalitas formal, tetapi juga aspek legal substansial dimana salah satu prinsip yang ada adalah prinsip kemajemukan. Kemajemukan ini dipraktikkan di Indonesia sehingga masing-masing warga negara berhak mengatur dan mengusulkan norma hukum agamanya sebagai regulasi hukum nasional di antaranya, (1) Kabupaten Manokwari mengeluarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol*. Politik pembangunan norma agama Kristen menjadi eksis karena Kabupaten Manokwari sebagai daerah masuknya Injil pertama kali di tanah Papua, dan yang kini dikenali sebagai Kota Injil dan Kota Peradaban Orang Papua.

¹⁶ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*.
<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus 2012.

¹⁷ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*,
<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus.

Dasar mengundang peraturan daerah ini adalah aspirasi dari seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari yang menghendaki ditiadakannya minuman beralkohol karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. (2) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan perda Syariat Islam berupa *Qanun* adalah *Qanun Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)*, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya* dan *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)*.¹⁸ Perda-perda tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat Aceh yang memiliki komitmen dalam memberlakukan norma hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terpenting dari hal itu adalah untuk menerapkan falsafah '*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana* ' (adat dari sultan, hukum dari ulama, *Qanun* dari putri pahang, *reusam* dari laksamana).¹⁹

Konfigurasi sistem politik Negara yang akomodatif terhadap norma-norma hukum agama dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah menjadi bagian dari pemeliharaan terhadap tradisi luhur masyarakat Indonesia yang kebanyakan dilandasi norma agama dan kepercayaan. Dalam kajian antropologis, ada varian hukum meliputi hukum kebiasaan, hukum rakyat, hukum penduduk asli, hukum tidak tertulis, dan hukum adat. Dengan demikian, hukum bukan hanya lembaga otonom, tetapi juga mengandung unsur kebudayaan, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan agama. Oleh sebab itu, dalam organisasi politik kenegaraan yang disebut “negara”, selain terdapat regulasi hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga memuat hukum agama, hukum rakyat, dan pengaturan lokal sebagai pengendali sosial.²⁰

Dengan demikian, kajian hermeneutika Betti telah memberikan ruang untuk membaca eksistensi hukum yang berkembang di masa Nabi Muhammad, masa-masa Kerajaan Islam dan Masa-masa Kemerdekaan yang mana hal itu sangat berguna untuk dijadikan bahan untuk pelembagaan hukum Islam di masa kini dan masa

¹⁸ www.djpp.depkmham.go.id.

¹⁹ A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Nurhadi (ed), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 163.

²⁰ Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum...*, hlm. 52-53.

mendatang. Eksistensi hukum yang berlaku sebelumnya akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan hukum di masa-masa mendatang.

F. Metode dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis Penelitian

Soemitro memasukkan penelitian hukum ke dalam golongan jenis menurut bidangnya bersama sama dengan penelitian pendidikan, penelitian sejarah dan lain-lainnya. Sedangkan Hasyim memasukkan penelitian hukum oleh beliau disebut tindak hukum ke dalam penggolongan segi bidangnya, yaitu: termasuk penelitian ilmu-ilmu sosial. Pada hakekatnya ilmu hukum bias dikategorikan masuk dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Namun demikian kita harus melihat kajian ilmu hukum itu sendiri. Kalau kajiannya meliputi materi normatif hukum itu sendiri, maka metode penelitian hukum itu tidak begitu saja mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya, karena fokus meneliti substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, maka penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif. Penelitian jenis ini sasaran bahan utama pada data sekunder berupa bahan hukum baik bahan hukum utama (primer), bahan hukum pelengkap (sekunder) maupun bahan informasi hukum (tersier). Sedangkan kalau penelitian hukum yang fokusnya pada masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman di antara para ahli hukum. Di antara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal.²² Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif.²³ dan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

²³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139

penelitian hukum yang doktrinal.²⁴ Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatife fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan, pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi UUSC pasal demi pasal. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis besar digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:²⁷

- a. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.
- b. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang.
- c. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm. 13-14.

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

²⁷ Meray hendrik mezak, "jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum," jurnal law review, vol. V, no. 3, maret 2016, h. 92.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat juga digunakan beberapa pendekatan lain, yaitu:²⁸

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
3. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

3. Teknik Pengolahan Data

Studi pustaka terhadap data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan dan perundangan). Adapun bahan sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal dan lain lain. Sedangkan, bahan tersier dapat digunakan, bahan tersier, kamus, ensiklopedi, *blacks laws dictionary*.

4. Teknik Analisa Data

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.²⁹ Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses sejarah dan implementasi pergulatan politik hukum Islam di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu “pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan”.³⁰

G. Rencana Pembahasan

Berikut ini sistematika pembahasan penelitian yang disajikan, yaitu: BAB I Pendahuluan: Latar Belakang, Permasalahan (Identifikasi, Batasan, Rumusan masalah), Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Konsep dan Teori relevan: Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 9

³⁰ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 103

BAB III Metode: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Penetapan Responden dan Teknik Analisa Data

BAB IV Hasil: Hasil Penelitian dan Diskusi data/temuan Penelitian Isi kandungan Undang Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu, Implementasi Undang-Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu, Posisi Undang-Undang Adat Lembaga dalam hukum nasional.

BAB V Penutup: Kesimpulan dan Penutup

H. Pustaka Acuan dan Bibliografi

A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Fomalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Nurhadi (ed), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006)

Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th)

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3Es, 1985).

Anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 1998).

Didi Kusnadi, *Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum*,

<http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20Indonesia.pdf>

Harun, "Perkembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia", Jurnal Suhuf, Vol. 21, No. 2, November 2009.

I Nyoman Suyatna, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Malang: Disertasi Universitas Brawijaya, 2011)

Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum: Menggagas Peraruran Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011).

- Jimly Asshiddiqie (3), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.th).
- M Masykuri Hadi, “Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No 1 Volume 8 Juni 2008*; <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf>
- M Taufik Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni dan Tradisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012)
- Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009, Fakultas Hukum UII.
- Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus 2012.
- Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I), <http://m.voaislam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.
- Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voaislam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007)
- Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Volume No 1 17 No 1 Juni 2010; http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17110151161_0854-8919.pdf
- Nanda Sambas, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, VOL. XI. NO. 3 November 2009, <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/88-eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional>, diakses 16 Desember 2012.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006).

Syaikh Shafiyyurralunan al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, terj. Hanif Yahya dkk, (Jakarta Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001).

Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan“, Jurnal Sasi Vol.17 No 3 Bulan Juli-September 2011.